

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Partisipasi Publik Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran suatu lembaga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada akhirnya hanya bisa dijawab melalui keberhasilan dalam jalannya pilkada. Partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari pilkada tahun 2010. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penulis, pada pilkada tahun Kabupaten Bantul 2010 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 73,65% (509.920 orang) sedangkan pada tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul sebesar 75,28% (523.817 orang). Hal tersebut berarti terjadi kenaikan partisipasi masyarakat sebesar 1,63% (13.897 orang). Sebenarnya KPU pusat sendiri memberikan target tingkat partisipasi sebesar 77,5% kepada KPU DIY, namun target tersebut memang belum tercapai secara maksimal dikarenakan berbagai hal.
2. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi setiap penyelenggaraan pilkada, yaitu banyaknya pelanggaran terhadap proses teknis pelaksanaannya. Permasalahan pilkada sesungguhnya tidak hanya karena banyaknya pelanggaran terhadap proses teknisnya, tetapi juga karena kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada.

Terkait dengan partisipasi masyarakat yang kurang maksimal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu faktor administrasi dan faktor golput. Penyelenggara di tingkat ini juga sepertinya kurang memiliki pengalaman terkait pekerjaan yang akan dihadapinya tersebut. Proses rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pilkada sedang berjalan menjadi salah satu penyebab kurangnya pengalaman yang dimiliki karena mereka tidak sempat untuk mengikuti bimbingan berupa teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga tugas yang mereka kerjakan dilakukan seadanya dan sebisanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama untuk pilkada. Partisipasi masyarakat dalam pilkada akan menentukan pemimpin mana yang akan menentukan nasib masyarakat selama lima tahun ke depan.
2. Penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU harus lebih meningkatkan perannya dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan pendataan lebih akurat lagi, dan menghimbau kepada para ketua RT agar memberikan surat undangan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pilkada.

3. Para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya melakukan kampanye dengan cara-cara yang lebih inovatif dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.
4. Tokoh masyarakat harus lebih meningkatkan lagi pergerakannya untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat di sekitarnya karena tidak semua tempat bisa dijangkau oleh KPU.